

## SKRIPSI

### UPAYA HUKUM TERHADAP KUPEDES BERMASALAH

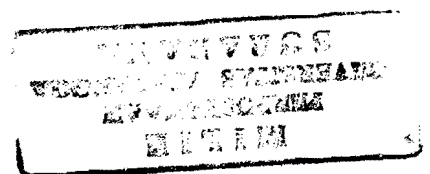


Per 142/05

Ash  
u

**SUGENG ASHARI**  
**NIM : 030335855**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



# UPAYA HUKUM TERHADAP KUPEDES BERMASALAH

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



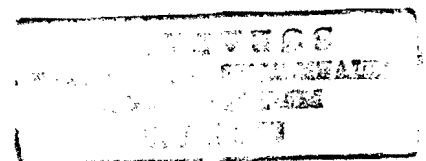
**Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 162 030**

**Penyusun**



**Sugeng Ashari**  
**NIM. 030335855**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisa pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan beberapa hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Usaha Pedesaan ( Kupedes ) di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) dalam meminimalkan terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Usaha Pedesaan ( Kupedes ), antara lain:

- a. **Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian ini dijalankan oleh pejabat kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI ), mulai pada saat pengajuan permohonan kredit oleh debitur sampai pada dicairkannya kredit.

- b. **Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan ini dijalankan setelah debitur menerima fasilitas kredit, dan sampai dengan pelunasan kredit tersebut. Pihak Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) menganggap pembinaan dan pengawasan sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk

mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo melalui BRI Unitnya dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada kredit atas dasar kelayakan usaha / Kupedes adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Kupedes Secara Damai

- 1) Pemberian fasilitas keringanan bunga
- 2) Penjualan agunan dibawah tangan

b. Penyelesaian Kupedes Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Artinya bahwa pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) menyerahkan penagihan kredit melalui instansi tertentu, yaitu melalui DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara) atau Pengadilan Negeri.

Penyelesaian melalui saluran hukum ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi BRI dari segi yuridis kuat dan beban biaya beracara (ligitasi) yang ringan.

Tetapi dari penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian bahwa fakta yang dijumpai adalah pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Sidoarjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah ini, hanya menggunakan upaya penyelesaian damai dan penagihan secara rutin dan belum pernah menggunakan penyelesaian melalui saluran hukum. Hal tersebut dikarenakan:



- a. Biaya beracara/ligitasi terlalu mahal.
- b. Posisi Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara yuridis lemah, karena jaminan/agunan tidak dipasang diikat secara nyata/kuat oleh notaris karena biaya Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHTO terlalu besar.  
(untuk agunan yang berupa bangunan dan atau tanah)

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) menggunakan alasan diatas dengan menimbang bahwa Kupedes merupakan kredit dengan skala yang kecil.

## 2. Saran

Dari fakta-fakta yang penulis temukan di lokasi penelitian yang kemudian dibahas dan dianalisa dalam bab-bab diatas, maka penulis berkehendak memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah melalui instansi yang berwenang dibidang perbankan melakukan penyuluhan atau semacam koordinasi terhadap bank-bank yang memberikan fasilitas kredit, terkait dengan kredit bermasalah. Pemerintah hendaknya juga memberikan suatu standart aturan dalam menyikapi kredit bermasalah yang nantinya dapat dijalankan oleh bank-bank tersebut secara serentak.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) hendaknya tetap konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan pembinaan serta pengawasan dalam pemberian kredit kepada debiturnya. Serta perlunya peningkatan profesionalitas dan

keahlian pejabat kredit lini guna lebih meminimalkan kredit bermasalah. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) hendaknya juga dapat mengikat barang jaminan/agunan dengan lebih sempurna sehingga dapat memiliki kedudukan yang lebih kuat secara yuridis.

Agar masyarakat pada umumnya dan debitur yang sedang menerima fasilitas kredit pada khususnya agar dapat lebih sadar akan kewajiban kembali kreditnya dan tidak menyalahgunakan pemberian kredit dari bank tersebut

